

# ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UNTUK MENGURANGI PENINGKATAN PENDUDUK DI KOTA MATARAM

Kartika Juita<sup>1</sup>, Rafly Naufal Ramadhan<sup>2</sup>, Rahmadani<sup>3</sup>, Diah Rizky Adekantari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Public Administration Study Program, Muhammadiyah University of Mataram,

[raflynaufalramadhan@gmail.com](mailto:raflynaufalramadhan@gmail.com)

<sup>1</sup>English Education, Muhammadiyah University of Mataram, [semnaslppm.ummat@gmail.com](mailto:semnaslppm.ummat@gmail.com)

---

## Keywords:

Keyword1, Population  
Keyword2, Control  
Keyword3, Family  
Keyword4, Planning

**Abstract:** The aim of this research is to analyze the effectiveness of population and family planning management policies implemented by the Mataram City Population and Family Planning Office in controlling population growth. The policy focuses on increasing access to family planning services and encouraging a nuclear family culture and has been implemented. Using qualitative research methods, this research concludes that although the policy is promising in reducing population growth, further improvements and expansion are needed to be able to address this problem effectively. The results of this research contribute to the ongoing debate regarding the role of Mataram city government policy through the Population Control and Family Planning Service (DPPKB) in addressing population growth and the need for more effective and sustainable solutions.

## Kata Kunci:

Katakunci1, Kependudukan  
Katakunci2, Pengendalian  
Katakunci3, Keluarga  
Katakunci4, Berencana

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Mataram dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan akses terhadap layanan keluarga berencana dan mendorong budaya keluarga inti dan telah diterapkan. Dengan menggunakan Jenis Metode penelitian kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan tersebut menjanjikan dalam mengurangi pertumbuhan penduduk, diperlukan perbaikan dan perluasan lebih lanjut agar dapat mengatasi masalah ini secara efektif. Hasil penelitian ini berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai peran kebijakan pemerintah kota Mataram melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam mengatasi pertumbuhan penduduk dan perlunya solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

---

## Article History:

Received: 25-05-2024

Online : 15-06-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## **A. LATAR BELAKANG**

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di duniat tingkat pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Sebenarnya jumlah penduduk yang besar bukanlah suatu masalah, sebab apabila semua penduduknya memiliki kualitas SDM yang baik maka justru akan memberikan kontribusi kepada negara (Abdurrahman<sup>1</sup>, M. Taufik Rachman<sup>2</sup>, 2019). Melalui (Larasati et al., 2019) Jika dilihat dari segi pembangunan, maka jumlah penduduk sangat berpengaruh dengan masalah pembangunan suatu wilayah. Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peran yang penting. Semakin lengkap data kependudukan yang tersedia maka semakin mudah rencana pembangunan di susun.

Menurut Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

Menurut (Admaja et al., 2019) masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya struktur umur penduduk di beberapa provinsi menjadi masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana nasional. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran di satu pihak dan lebih cepatnya penurunan tingkat kematian di lain pihak. Pemerintahan kabupaten/kota harus berusaha mengembangkan keunggulan komperatif dalam setiap pelayanan terhadap publiknya. Oleh karena itu, proses-proses sehubungan dalam pengkajian dan penerapan strategi-strategi sangat tergantung pada siapa yang menjadi pimpinan serta kultur dari daerah tersebut. Menurut beberapa pengalaman tidak ada kiat atau resep yang dijamin pasti dan paling efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Namun aspek yang penting bagi semua organisasi adalah adanya kesadaran strategis di mana pimpinan memahami betul sampai seberapa baiknya urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik (Rompah et al., 2023).

Dalam (Di et al., 2023). Diera globalisasi ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk di Negara berkembang sangat berdampak pada peningkatan angka pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan mengakibatkan resiko kemiskinan yang tinggi, negara yang laju pertumbuhan penduduknya memiliki peraturan yang menekan jumlah angka kelahiran, peraturan ini diharapkan agar bisa memperlambat angka kelahiran yang tidak terkontrol. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya struktur umur penduduk di beberapa daerah menjadi masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana tingkat pertumbuhan. Pengendalian jumlah penduduk lewat program Keluarga Berencana (KB) dapat merendahkan angka kelahiran serta angka kematian yang hendak meningkatkan jumlah penduduk usia produktif serta lanjut usia, transformasi komposisi penduduk, derajat pendidikan serta menyusutnya tingkat ketergantungan (Richter et al., n.d.).

Pelaksanaan program KB ditujukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa pelaksanaan program KB dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dilihat dari peran serta para kader dan lapisan masyarakat yang terlibat program KB sehingga dapat membantu dalam penambahan akseptor KB baru. Namun masih ada sebagian masyarakat yang kurang mengetahui tentang pentingnya KB dan masalah

anggaran dana dari pemerintah sehingga menyebabkan terhambatnya program KB (Nurmahdalena, 2016). Melihat permasalahan penduduk dan dampak yang ditimbulkan, Pemerintah Provinsi NTB berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui pembuatan kebijakan. Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu melalui Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengembangan Kampung KB (Keluarga Berencana) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana beberapa Kampung KB rintisan yang menjadi awal dari program ini dilibatkan untuk menyelenggarakan kebijakan tersebut (Maolana & Zaenuri, 2022).

Menurut (Ilham, 2022). Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mengurangi Angka Kelahiran merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah laku. Berkaitan dengan wewenang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahannya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) berupaya menurunkan angka peningkatan penduduk di wilayah kota Mataram melalui program-program yang telah dilakukan. Kota Mataram merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk kelima diantara 10 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan jumlah penduduk dalam lima tahun terakhir yaitu periode tahun 2016 sampai dengan 2021 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada awal tahun 2016 jumlah penduduk kota Mataram 459.314 jiwa seiring dengan perkembangan dari waktu ke waktu selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menjadi 516.576 jiwa, ini menunjukkan bahwa dalam rentang waktu enam tahun penduduk Kota Mataram mengalami peningkatan sebesar 57.259 jiwa.

Jumlah penduduk Kota Mataram selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur. Usia produktif mendominasi penduduk Kota Mataram. Secara spesifik kelompok umur 15-64 tahun memiliki distribusi tertinggi dalam jumlah penduduk Kota Mataram. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Diperkirakan, era bonus demografi ini akan mencapai puncaknya pada periode 2025-2030.

Kampanye program KB (Keluarga Berencana) yang dilakukan oleh untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga. Selain itu program KB juga dapat berfungsi untuk menekan jumlah angka kelahiran. Maka suatu daerah harus memberi pandangan yang bagus bagi masyarakat, guna untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat terkait tentang pengendalian pertumbuhan penduduk, agar di suatu daerah menjadi daerah yang mempunyai pengendalian pertumbuhan penduduk yang berkualitas serta membuat sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) untuk memberikan pemahaman pada masyarakat dari sisi kesehatan baik kesehatan reproduksi bagi ibu maupun kesehatan pada bayi yang dampaknya sangat signifikan terhadap pertumbuhan penduduk kota Mataram.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram menghadapi tantangan besar dalam mengelola pertumbuhan penduduk yang pesat, yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Mataram, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram tentu saja menjalankan program terkait untuk mengatasi permasalahan ini,

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram dengan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

## **B. METODE**

Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data primer dalam data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

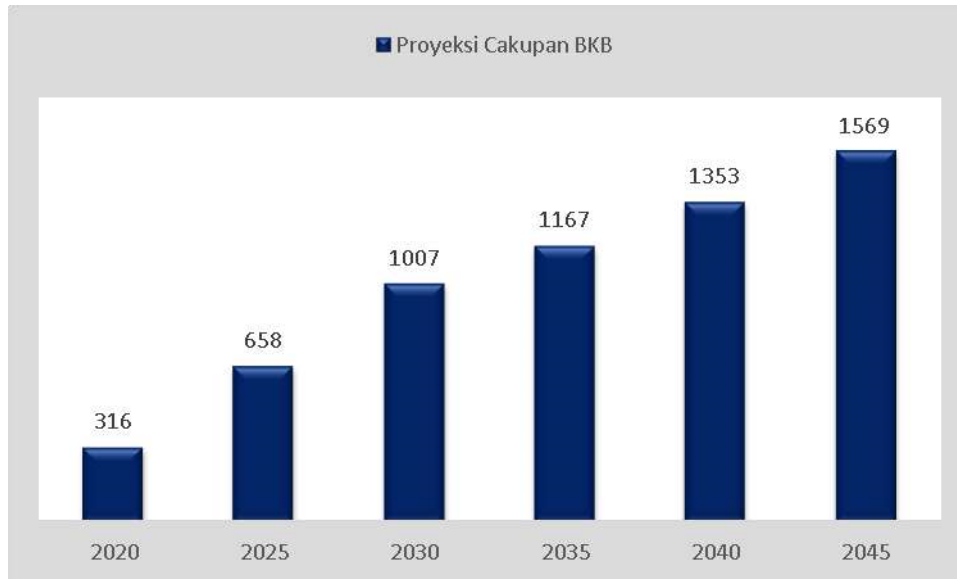
### **1. Upaya Menekan Angka Pertumbuhan Penduduk**

Upaya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam membantu mengurangi peningkatan penduduk di wilayah kota Mataram yaitu dengan adanya program-program Keluarga Berencana (KB), yaitu dengan program Pembangunan Keluarga. Program Pembangunan Keluarga meliputi : Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB), Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR), Cakupan Bina Keluarga Lansia (BKL). Adapun tujuan serta hasil dari program yang telah terlaksana tersebut ialah :

- Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral, untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan (BKKBN, 2018).

Proyeksi cakupan BKB Kota Mataram tahun 2020-2045 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, cakupan BKB sebesar 316 keluarga, diproyeksikan meningkat menjadi 658 keluarga pada 2025, dan naik lagi menjadi 1007 keluarga pada tahun 2030. Peningkatan ini diproyeksikan terus terjadi hingga tahun 2045 menjadi 1569 keluarga. Untuk lebih jelasnya, grafik proyeksi Cakupan BKB kota Mataram disajikan dalam grafik dibawah ini.

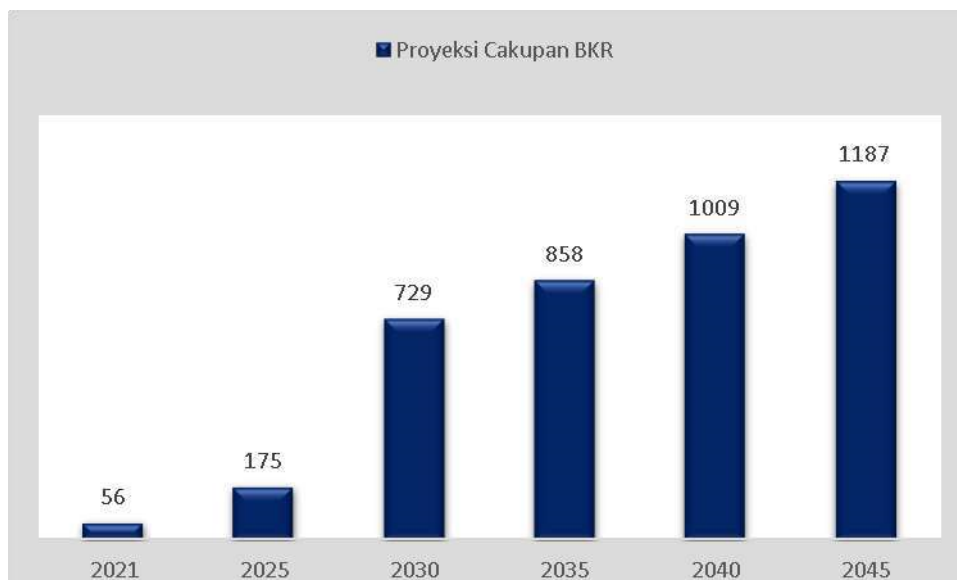


**Gambar 1.** Proyeksi Cakupan BKB Kota Mataram Tahun 2020-2045

- Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR)

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial dan moral. Permasalahan remaja merupakan permasalahan yang sangat kompleks, khususnya dari jumlahnya yang cukup besar.

Proyeksi cakupan BKR kota Mataram tahun 2021-2045 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, cakupan BKR sebesar 56 keluarga, diproyeksikan meningkat menjadi 729 pada tahun 2030. Peningkatan ini diproyeksikan terus terjadi hingga tahun 2045 menjadi 1187 keluarga remaja. Proyeksi BKR kota Mataram tahun 2021-2045 disajikan dalam grafik dibawah ini.

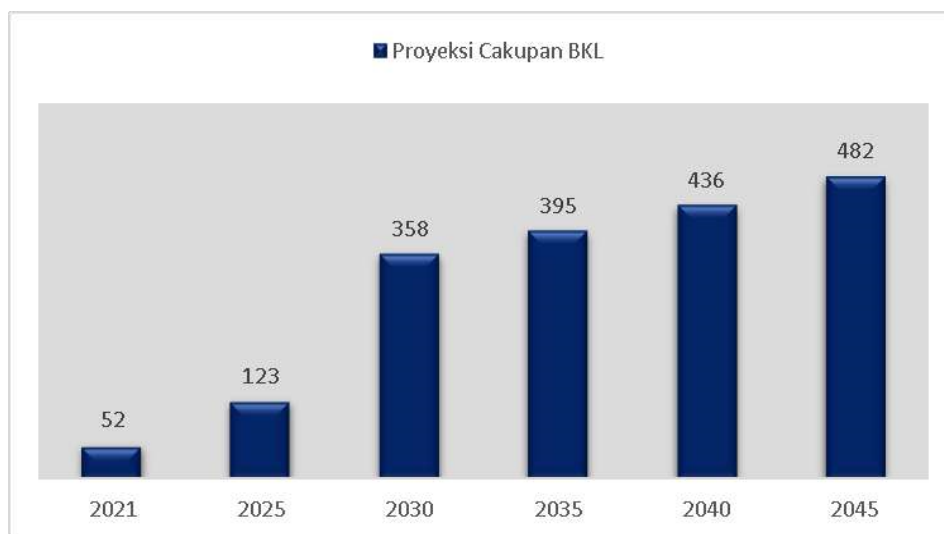


**Gambar 2.** Proyeksi Cakupan BKR Kota Mataram Tahun 2021-2045

- **Cakupan Bina Keluarga Lansia (BKR)**

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kegiatan bagi keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, bertaqwa sehingga tetap dapat diberdayakan dalam pembangunan dengan memperhatikan kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya sesuai usia dan kondisi fisiknya. Menurut UU No. 13 Tahun 1998, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Sedangkan batasan lanjut usia (elderly) menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) antara 60 sampai 74 tahun.

Proyeksi BKL kota Mataram tahun 2021-2045 ditampilkan dalam grafik dibawah ini:



**Gambar 3.** Proyeksi Cakupan BKL Kota Mataram Tahun 2021-2045

Berdasarkan grafik diatas, proyeksi cakupan BKL kota Mataram mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 sebesar 52 keluarga, diproyeksikan meningkat menjadi 123 keluarga pada tahun 2025, dan meningkat lagi menjadi 358 keluarga pada tahun 2030. Kenaikan ini diproyeksikan terus terjadi hingga tahun 2045 menjadi 482 keluarga.

Jadi melalui program tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram dapat membantu untuk menekan angka pertumbuhan penduduk dengan upaya bertahap dan berkesinambungan.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) berupaya menurunkan angka peningkatan penduduk di wilayah kota Mataram melalui program-program yang telah dilakukan. Program KB (Keluarga Berencana) yang dilakukan oleh untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga dan dapat berfungsi untuk menekankan jumlah angka kelahiran. Upaya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam membantu mengurangi peningkatan penduduk di wilayah kota Mataram yang telah dilakukan oleh program-program Keluarga Berencana (KB), yaitu program pembangunan keluarga.

Saran yang ingin disampaikan peneliti dari penelitian yang telah dilakukan ini yaitu, peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram yang telah bekerja sama dalam membantu penelitian ini sehingga mencapai hasil sesuai dengan hasil yang telah diteliti dan ucapan terimakasih kepada Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos.,M.AP. Selaku dosen mata kuliah yang turut serta membantu dalam penyusunan artikel ini.

## REFERENSI

- Abdurrahman1, M. Taufik Rachman2, D. P. A. (2019). 1272-3449-1-Sm (1). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 152. file:///C:/Users/dd d/Downloads/1272-3449-1-SM (1).pdf
- Admaja, M. F., Kalalinggi, R., & Alaydrus, A. (2019). Peran dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dppkb ) dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 983–994. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_ganjil \(07-03-19-04-50-58\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil (07-03-19-04-50-58).pdf)
- Di, S., Pengendalian, D., Keluarga, D., & Kota, B. (2023). Ladies, N. *Oxford English Dictionary*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.1093/oed/7479512738>
- Ilham. (2022). *The Departement of Population Control and Family Planning Role 's In Reducing Fertility In Parepare , South Sulawesi PENDAHULUAN Pertumbuhan penduduk di masa pandemi dianggap tinggi dan menjadi permasalahan mendesak bagi seluruh negara di dunia . Berdasa. X*, 1–7.
- Larasati, Muda, I., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2019). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk The Role of the Office of Population and Family Planning Control in Controlling Population Growth. *Perspektif*, 8(1), 13–18.
- Maolana, L. A. C., & Zaenuri, M. (2022). Implementasi Program Kampung Kb Dalam Menekan Pertumbuhan Penduduk Di Ntb Berdasarkan Pergub Nomor 6 Tahun 2019. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 51–63. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17330>
- Nurmahdalena, A. (2016). Peran Penyuluh Keluarga Berencana (Pkb) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir. *Administrasi Negara*, 4(4), 4869–4881.
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 1–19.
- Rompah, J. K. O., Goni, S. Y. V. I., & Tasik, F. C. M. (2023). Efektivitas Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bitung Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Bitung. *Agri-Sosioekonomi*, 19(2), 1247–1254. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i2.50150>
- Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.